

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang dikaji, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Pelaksanaan ganti kerugian tanah kas desa pada pengadaan tanah Jalan Tol Yogyakarta-Solo di Desa Ngawen Kecamatan Ngawen dan Desa Demakijo Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten setelah dilakukan analisis dengan beberapa informasi yang diperoleh dari narasumber dan responden, bahwa pelaksanaan yang dilakukan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan umum. Desa ngawen dan demakijo mengikuti seluruh proses yang diminta oleh pihak Badan Pertanahan Nasional. Desa meminta izin kepada bupati dan kepada gubernur, setelah mendapatkan izin desa melakukan pelepasan kepada notaris, sesudah itu desa mendapatkan ganti kerugian akibat dari proyek jalan tol Yogyakarta-Solo, kemudian setelah mendapat ganti kerugian desa mencari tanah pengganti yang terkena proyek jalan tol Yogyakarta-Solo.
2. Faktor yang menjadi kendala dalam keterlambatan ganti kerugian kas desa yaitu karena waktu proses pelepasannya yang lama, dimana harus melewati proses Setelah mendapat izin dari bupati dan gubernur maka dilakukan permohonan pengukuran terhadap tanah desa yang terkena dampak dari

jalan tol, kemudian diterbitkannya peta bidang hasil pengukuran, setelah itu diajukannya harga appresial kepada pemerintah, setelah itu dilaksanakannya pelepasan akta dan di berikan ganti kerugian, kemudian melakukan permohonan sertifikat kepada Badan Pertanahan Nasional.

B. Saran

Adapun saran yang disampaikan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang sudah di simpulkan oleh peneliti yaitu:

1. Dalam upaya penyelesaian pelaksanaan pemberian ganti kerugian tanah kas desa di Klaten yang terdampak jalan tol Yogyakarta-Solo, pemerintah harus melakukan peninjauan dilapangan agar dapat selesai dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan umum
2. Saran untuk waktu yang menjadi kendala dalam pengembalian ganti kerugian ini pemerintah harus lebih konsisten dengan keputusan awal terhadap waktu pelaksanaan ganti kerugian dan waktu pembayaran ganti kerugian dalam proyek jalan tol Yogyakarta-Solo ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Alumni, Bandung, 1982).
- Arba, H 2019, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Achmad Sodiki, *Politik Hukum Agraria*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013).
- Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, dkk. (2020). *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*. CV.Pustaka Ilmu, Yogyakarta.
- Harsono, Boedi. (2003). *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria. Isi dan Pelaksanaannya, jilid, 1*.
- I Astawa, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia*, (Jakarta: Alumni, 2008).
- J. Satrio, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, (Alumni, Bandung, 1999).
- Julius Sembiring, *Tanah dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*, 2010.
- Maurer, J. L. (2014). *Pamong Desa or Raja Desa?: wealth, status and power of village officials*. In *Leadership on Java* (pp. 97-118). Routledge.
- Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*, (Mandar Maju, Bandung, 1994).
- Rubaiae, Ahmad. 2007. *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Garafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Sugiyomo, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

JURNAL

- Taufiq, Reny Medikawati, Yoze Rizki, and M. Rizki Amanda Pratama. "Simulasi Deteksi Golongan Kendaraan pada Gerbang Tol Menggunakan YOLOv4." *Jurnal CoSciTech (Computer Science and Information Technology)* 3.2

(2022).

INTERNET

Badan Pengatur Jalan tol, <https://bpjt.pu.go.id/konten/jalan-tol/tujuan-dan-manfaat>, diakses pada 19 September 2021 WIB

Indonesiabaik.id, <https://indonesiabaik.id/infografis/berapa-jumlah-penduduk-indonesia-ya>, diakses pada 06 April 2023 pukul 14.04 WIB.

Newsunair, <https://news.unair.ac.id/2022/01/05/status-hak-atas-tanah-kas-desa-dan-prosedur-pendaftarannya-menurut-hukum-administrasi-pertanahan/?lang=id>, diakses pada 28 Maret 2023 pukul 20.20 WIB..

SOLOtrend <https://solotrend.net/index.php/2022/08/26/sempat-menolak-32-warga-ngawen-akhirnya-mau-menerima-ganti-rugi-proyek-tol/> diakses pada 06 April 2023 pukul 15.12

Tempo.co, <https://nasional.tempo.co/read/1688435/warga-klaten-protes-pembebasan-lahan-proyek-tol-solo-yogya-ke-ksp>, diakses pada 06 April 2023 pukul 14.48 WIB.

Tribunjogja.vom. <https://jogja.tribunnews.com/2023/02/10/uang-ganti-rugi-tol-jogja-solo-senilai-rp337-triliun-sudah-dibagikan-ke-warga-45-desa-di-klaten>, diakses pada 06 April 2023 pukul 14.59 WIB.

Sorot.co, <https://klaten.sorot.co/berita-5585-mengenal-sejarah-dibalik-berdirinya-prasasti-upit-di-kahuman.html> diakses pada 01 Oktober 2023 pukul 19.39 WIB

Kompas.com <https://yogyakarta.kompas.com/read/2023/06/24/172540678/tanah-kas-desa-pengertian-dasar-hukum-dan-aturan-pemanfaatan?page=all> diakses pada 22 Februari 2024 pukul 19.14 WIB.

BPK RI <https://jateng.bpk.go.id/ada-436-bidang-tanah-kas-desa-di-klaten-terdampak-pembangunan-tol-yogyakarta-solo/> diakses pada 22 Februari 2024 pukul 19.45 WIB.

THESIS

Agus Oprasi, 2009. *Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Terhadap Hak Atas Tanah Yang Terkena Proyek Pembangunan Water Front City Di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat*, Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.

Cindri Yanto, 2019. *Tinjauan Hukum Islam Tentang ganti Rugi Hak Rakyat Dalam*

Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Skripsi, Lampung:
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Rezky Amaliah, 2017. *Tinjauan Hukum Pelaksanaan Ganti Rugi Terhadap Pencabutan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Rel Kereta Api Di Kabupaten Barru*, Skripsi, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Neraga Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan umum

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 102 Tahun 2016 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan tol.